



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELAFKI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 668689

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.110.750.000

1. Tanah Seluas 31140 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 14975 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI
Rp. 1.005.000.000
3. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL
SENDIRI Rp. 400.250.000
4. Tanah Seluas 500000 m2 di KAB / KOTA SOLOK, WARISAN Rp.
1.500.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SOLOK, WARISAN Rp. 705.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 863.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 750.000.000

Sub Total Rp. 6.841.750.000

**III. HUTANG****Rp. 383.844.021****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 6.457.905.979**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.